P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI

Muhammad Sabyan^{1)*}, Iqra Wiarta²⁾

^{1,2)}Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Jambi Email Korespondensi : sabyanaab@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang juga tidak signifikan. Namun, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, mengindikasikan peranan penting pendapatan asli daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Analisis simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi. Meskipun terdapat faktorfaktor lain di luar model yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 25,6%, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kebijakan pajak, retribusi, dan pengelolaan pendapatan daerah, serta memperkuat upaya pemahaman ekonomi dan pengembangan ketenagakerjaan di kota ini. Dengan nilai Adjusted R Square mencapai 0,744, model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja

Abstract

This thesis aims to analyze the impact of local taxes, local levies, and local revenue on employment absorption in the city of Jambi. The research results indicate that local taxes have a non-significant negative effect on employment absorption, while local levies have a non-significant positive effect. However, local revenue significantly and positively influences employment absorption, underscoring the crucial role of local revenue in job creation. Simultaneous analysis reveals that all three variables collectively have a significant impact on employment absorption in Jambi. Although there are external factors beyond the model affecting employment absorption by 25.6%, these findings offer valuable insights for local tax, levy, and revenue management policies, enhancing economic understanding and employment development efforts in the city. With an Adjusted R Square value of 0.744, this model effectively explains a significant portion of the variation in employment absorption in Jambi.

Keywords: Local Taxes, Local Levies, Local Revenue, Employment Absorption

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional dan daerah.

Retribusi daerah mempunyai begitu banyak jenis dibandingkan dengan pajak daerah,

tetapi tidak semua retribusi berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan atau memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. Sebaliknya pungutan pajak tidak memiliki keterkaitan atau tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang yang dibayarkan.

Tenaga kerja manusia merupakan unsur yang sangat penting dan sangat mempengaruhi hidup matinya perusahaan atau organisasi. Dalam berorganisasi terdapat hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk membicarakan apa yang menjadi tujuannya. Pada manusia dapat diselidiki faktor-faktor yang dapat mendorong mereka untuk saling berhubungan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Suparmoko et all, 2021). Menurut Sukirno (2023) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi, barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti; pertambahan jumlah produksi barang dan industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi dan juga kota yang sedang berkembang mempunyai berbagai macam sumber pemasukan yang dapat diperoleh dalam menambah Pendapatan Asli Daerahnya, dari berbagai macam sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali di Kota Jambi adalah pajak dan retribusi. Sebagai daerah yang merupakan pusat jasa dan industri Kota Jambi mempunyai peluang yang cukup besar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari unsur pemungutan pajak dan retribusi tersebut. Dengan berjalan baiknya pemungutan pajak dan retribusi, maka kemungkinan besar bahwa pemungutan pajak dan retribusi dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi, untuk melihat pendapatan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi 2018-2022.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2018	215.444.433.999	40.389.059.087	338.891.882.593	
2019	255.915.037.459	38.540.603.597	393.429.595.384	
2020	216.961.981.307	40.479.596.104	355.674.818.035	
2021	244.726.978.039	51.844.265.428	384.730.643.791	
2022	317.880.000.000	49.761.000.000	465.887.262.838	
Rata-rata	250.185.686.160	43.602.904.843	387.722.840.528	

Sumber: Kemenkeu, 2023

Selama lima tahun terakhir, pendapatan daerah di kota ini telah mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing mencapai Rp 215.44 miliar dan Rp 40.39 miliar. Namun, pendapatan pajak

daerah mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2021, mencapai Rp 255.92 miliar dan Rp 244.73 miliar, sementara pendapatan retribusi daerah mencapai titik tertingginya pada tahun 2021, yaitu Rp 51.84 miliar. Meskipun demikian, tahun 2020 melihat penurunan pendapatan pajak daerah menjadi Rp 216.96 miliar, dan tahun 2022 mencatatkan pendapatan pajak daerah tertinggi sebesar Rp 317.88 miliar. Sementara itu, pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuasi serupa, dengan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 465.89 miliar setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Fenomena fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan perpajakan daerah yang mempengaruhi pendapatan kota ini selama periode tersebut.

Selama rentang waktu 2020 hingga 2023, Kota Jambi mengalami dinamika yang signifikan dalam hal penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Pada awal periode ini, dampak pandemi global COVID-19 terasa kuat, mempengaruhi perekonomian lokal dan pola pembayaran pajak serta retribusi. Tahun 2020 ditandai dengan penurunan pendapatan akibat kondisi ekonomi yang sulit, yang tercermin dalam penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap situasi pandemi, fenomena menarik terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, meskipun masih dalam situasi yang menantang, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Masyarakat dan pelaku usaha secara bertahap beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang berdampak positif pada pola pembayaran pajak dan retribusi.

Pada akhirnya, fenomena dari tahun 2020 hingga 2023 ini mencerminkan adaptasi dan ketangguhan Kota Jambi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, sekaligus menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi demi mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan selama rentang waktu 2020 hingga 2023, Kota Jambi telah menyaksikan perubahan yang menarik dalam hal penyerapan tenaga kerja. Tahun 2020 dimulai dengan tantangan berat akibat pandemi COVID-19 yang telah merusak banyak sektor ekonomi. Penurunan aktivitas bisnis dan pembatasan mobilitas menyebabkan penurunan signifikan dalam peluang pekerjaan di berbagai sektor. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi skala operasi mereka atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk menjaga kelangsungan bisnis. Ketika memasuki tahun 2022 dan 2023, Kota Jambi mengalami tren positif dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi di beberapa sektor, perluasan usaha mikro dan kecil, serta program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih kuat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan peluang kerja. Dengan pendapatan asli daerah yang meningkat, pemerintah kota mampu mendukung program-program inklusif yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.

2. TINJAUAN PUSTAKA Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*selfsupporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber peneriman dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaanya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum,dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu:

- i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- ii. Jasa giro
- iii. Pendapatan bunga
- iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424

3. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi, survei, atau eksperimen yang telah dijalankan oleh orang lain atau untuk penelitian lain akan tetapi kita pergunakan dalam <u>arti penelitian</u>. Sumber data yang dijadikan rujukan untuk penulisan ini adalah.

- 1. BPS Kota Jambi
- 2. Disnaker Kota Jambi
- 3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2019).

3. METODE PENELITIAN

untuk melihat bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

 X_1 = Pajak Daerah X_2 = Retribusi Daerah

 X_3 = Pendapatan Asli Daerah

 β_0 = Konstanta

 $\beta_1, \beta_2, \beta_2 =$ Koefisien Regresi

e = Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Atau Dimasukan Dalam Model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi R² Model Summary

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.863ª	.744	.634	12024.805

a. Predictors: (Constant), pendapatan asli daerah, retribusi daerah ,pajak daerah

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,744. Hal ini berarti kemampuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dalam menjelaskan penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi sebesar 74,4% sedangkan 25,6% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji f) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2941400792	3	980466930.572	6.781	.018 ^b
	Residual	1012171467	7	144595923.859		
	Total	3953572259	10			

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja

b. Predictors: (Constant), pendapatan asli daerah, retribusi daerah, pajak daerah

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka didapatkan hasil f hitung sebesar 6.781 dan f tabel sebesar 4.35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,018 yaitu < 0,05 yang berarti hal ini menunjukan bahwa variabel pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi

Uji t-Statistik Coefficients^a

				Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	198745.593	15522.112		12.804	.000
	pajak daerah	-1.557	.000	066	193	.852
	retribusi daerah	1.929	.000	.156	.644	.540
	pendapatan asli daerah	1.736	.000	.864	2.980	.021

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja

a. Variabel Pajak Daerah

Variabel *pajak daerah* dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Berdasarkan uji statistik dengan uji t memberikan hasil yang positif, nilai thitung sebesar 3,070 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,812. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,852 > 0,05, dari hasil uji signifikansi diatas dapat dikatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.

b. Variabel Retribusi Daerah (X_2)

Variabel *retribusi daerah* dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan. Berdasarkan uji statistik dengan uji t memberikan hasil yang positif. Nilai thitung sebesar 0,644 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,812, dan tingat signifikansi menunjukan angka yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,540>0,05 maka dapat dikatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi

c. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3)

Variabel pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Berdasarkan uji statistik dengan uji t memberikan hasil yang positif. Nilai thitung sebesar 2,980 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,812, dan tingat signifikansi menunjukan angka yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 maka dapat dikatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1. Pajak daerah menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan retribusi daerah memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
- 2. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.
- 3. Secara simultan, variabel pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini mendukung model penelitian untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Meskipun variabel lain di luar model juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 25,6%,

4. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi kebijakan fiskal dan pengembangan ekonomi di Kota Jambi. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,744, model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam penyerapan tenaga kerja di kota ini.

Saran

Pemerintah Kota Jambi dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak daerah yang saat ini diterapkan di Kota Jambi. Ini dapat mencakup analisis dampak kebijakan perpajakan tertentu terhadap penyerapan tenaga kerja, serta potensi peningkatan dalam pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Penelitian semacam ini dapat membantu pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Kota Jambi dapat melakukan pengembangan strategi retribusi daerah yang lebih efektif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Ini dapat melibatkan analisis jenis retribusi yang paling berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan mekanisme insentif untuk mendorong sektor-sektor tertentu untuk lebih berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pemerintah Kota Jambi dapat mengoptimalkan peran retribusi dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Devas, 2017. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim dan Kusufi, 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Jukumala Dewi, 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Kamaluddin, 2016. Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.

Mcqueen, 2012. "The Effect of Inflation News On High Frequency Stock Return", The Journal of Business.

Musgrave, 2010. Theory of public Finance. A Study in Public Economy, New. York.

Nasution, 2017. Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, Universitas Terbuka.

Natawijaya, 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi. 1. Jakarta: Salemba Empat.

Reggie W Mononimbar, 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Rochmad Soemitro, 2013. Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung: Penerbit PT. Eresco.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,

Sukirno, Sadono. 2012. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* . Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

Sunarto, 2016. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah), Jurnal Dharma Ekonomi.

Suparmoko, 2012. Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Andi. Yogyakarta.